



AGAMA DALAM TANTANGAN ETIKA GLOBAL

Franz Magnis-Suseno

PENGANTAR

Tidak mengherankan bahwa ada reaksi-reaksi negatif. Negatif dalam arti: Menutup diri total. Apalagi kalau revolusi budaya disertai - sebagaimana banyak terjadi - dengan pemiskinan, urbanisasi, kehancuran ikatan sosial, a-nomisasi kehidupan massa masyarakat. Lalu ada reaksi primordialistik, fundamentalistik, disertai kekerasan.

Namun globalisasi itu bukan hanya sebuah kehancuran. Dia juga membawa kesempatan dan keterbukaan. Dan itu terutama karena dalam globalisasi itu ada dua unsur yang bergelut: Apa yang dalam TOR seminar ini disebut "budaya

materialis liberal" di satu pihak dan nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi titik acuan sebuah etika politik baru di lain pihak.

Bagaimana peran agama di masa globalisasi mendatang, tetapi juga, apakah sebuah bangsa, misalnya saja bangsa Indonesia, berkembang secara relatif lancar dan positif, atau disertai pergolakan dan disrupsi besar, akan tergantung dari sejauh mana globalisasi tidak dilepaskan dari cita-cita etika universal ini.

Dalam makalah ini saya akan lebih dahulu (1) membahas tantangan kemanusiaan universal itu - secara agak luas, dengan memanfaatkan sebuah teks yang sudah saya tulis, - lalu, dengan agak ketat, memasuki (2) "budaya materialis liberal", untuk, (3), menarik perhatian pada dimensi mene-nengah, hubungan antar komunitas.

I. TANTANG KEMANUSIAAN UNIVERSAL

1. Munculnya budaya kemanusiaan universal

Saya bertolak dari wawasan kemanusiaan yang tradisional. Wawasan kemanusiaan tradisional itu dapat dikatakan berdasarkan paradigma "orang kita orang asing". Artinya, orang lain dipandang tergantung apakah ia termasuk kelompok kita [keluarga kita, kampung kita, agama kita, kasta

kita, suku kita, bangsa kita] atau tidak. Perlakuan terhadapnya ditentukan dari apakah ia termasuk "orang kita" atau "orang asing". Nah, mulai dengan Renaissance, dan terutama zaman Pencerahan [abad 17 dan 18 M.] paradigma itu mulai diganti oleh paradigma yang baru, di mana setiap orang, entah termasuk kelompok sendiri atau tidak, dihormati sebagai manusia. Paradigma baru itu saya sebut "paradigma martabat manusia universal".

Paradigma baru itu terungkap dalam sebuah etika politik baru yang unsur-unsurnya adalah apa yang sekarang kita maksud kalau bicara tentang budaya demokrasi: Pengakuan terhadap otonomi dan kesamaan semua orang sebagai manusia; hormat terhadap hak-hak asasi; penghapusan hukuman yang brutal; larangan terhadap penyiksaan; kebebasan berfikir dan beragama; toleransi religius; demokrasi; keadilan sosial; solidaritas nasional dan internasional; perlindungan terhadap mereka yang lemah, jaminan hak para minoritas; negara hukum; sistem peradilan yang tidak berfihak; perlindungan hukum universal; prinsip non-diskriminasi; pengakuan martabat manusia segenap orang, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, warna kulit, pola kebudayaan, kedudukan sosial; dlsb.

Ada dua hal yang menarik sekitar etika kemanusiaan universal itu: Pertama bahwa, kalau kita mengikuti pen-

dapat filosof Jürgen Habermas, cita-cita itu secara potensial sudah termuat dalam agama-agama universal. Khususnya monotheisme dengan tekanan pada transendensi Allah sangat penting dalam menyadari martabat manusia universal.

Kedua bahwa secara historis etika yang lebih manusiawi itu tidak diperjuangkan oleh agama-agama, melainkan oleh ideologi- ideologi besar yang mulai dengan zaman Pencerahan. Waktu para pemikir Pencerahan mulai memperjuangkan cita-cita etika politik baru itu yang bertujuan menjamin keluhuran martabat manusia ciptaan Allah, agama-agama justru bersikap dingin. Cita-cita demokrasi, hak asasi manusia, toleransi religius, kebebasan berfikir dan beragama, cita-cita kebebasan dan kesamaan manusia semula ditentang oleh agama-agama. Pada waktu para pemikir terkemuka telah menggantikan paradigma lama "orang kita orang asing" dengan paradigma "martabat manusia universal", agama-agama justru semakin berpegang pada paradigma lama. Agama-agama menjadi terbelakang dan dianggap bersekutu dengan kekuatan-kekuatan lama. Kiranya banyak kesulitan agama-agama sekarang berhadapan dengan dunia global berasal dari ketertutupan dulu itu.

Karena sikap negatif agama-agama itu sebagian besar kemajuan zaman modern berkembang dengan nada anti-agama. Sekularisme adalah khas fenomena abad yang lalu di

mana orang-orang yang mau maju merasa terhadang oleh agama. Maka mereka ingin menyingkirkan agama dari kehidupan publik. Sedangkan cita-cita manusia universal diperjuangkan oleh ideologi-ideologi keselamatan sekularistik besar seperti liberalisme, sosialisme dan komunisme.

Baru dalam abad ini agama-agama mulai membuka diri. Gereja Katolik misalnya baru menerima dengan tegas cita-cita demokrasi, hak asasi manusia, toleransi religius, kebebasan beragama dan berfikir dalam Konsili Vatikan II [1962-1965].

2. Tantangan pada akhir abad ke-20

Akhir abad ini melihat suatu situasi yang menarik. Di satu pihak ideologi-ideologi sekularistik besar abad yang lalu semua sudah kompes. Yang tetap berada di panggung dunia adalah agama-agama yang ternyata tidak hilang sebagaimana pernah diramalkan. Agama-agama berada dalam proses pembaharuan diri.

Situasi ini menempatkan agama-agama ke dalam tantangan yang dapat disebut historis: Apakah mereka siap dan bersedia untuk menjadi pendukung utama etika kemanusiaan universal, warisan ideologi-ideologi besar yang sebenarnya warisan agama-agama sendiri? Ataukah mereka

sekali lagi menutup diri, menjadi egosentrik dan sempit dan gagal menyambut panggilan historis itu? Dapat juga dirumuskan begini: Apakah agama-agama berani merealisasikan universalisme positif yang dititipkan Sang Pencipta ke dalam mereka.

Dengan demikian kita kembali kepada pertanyaan semula: Apa peran agama dalam menopang perkembangan peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia? Menurut saya jawaban tergantung dari bagaimana agama-agama di Indonesia bereaksi terhadap tantangan historis itu. Jadi apakah agama-agama akan memajukan peradaban hidup bersama bangsa Indonesia, apakah mereka akan memajukan bangsa dalam arti maju ke perealisasi kemandusiaan yang lebih utuh akan tergantung dari apakah agama-agama akan menunjang penciptaan budaya kemandusiaan universal itu.

Kiranya "medan perang ideologis" dalam dasawarsa-dasawarsa mendatang tidak lagi akan ditentukan oleh pertentangan antara ideologi-ideologi besar [karena sudah melayu], tidak juga antara agama dengan ideologi-ideologi itu [karena alasan sama], tetapi juga tidak oleh pertentangan antara agama-agama sendiri [sekarang saja di mana masih banyak terdapat gesekan, salah faham, saling curiga antara agama, kita menyaksikan suatu tekad yang membesarkan hati: sebenarnya agama-agama besar bersedia untuk saling

menerima - tanpa menjadi relativistik]. Saya melihat pertentangan ideologis dalam sebuah garis yang tidak mengikuti batas agama- agama, melainkan ditemukan di dalam masing-masing agama dan kelompok kepercayaan sendiri. Yaitu di antara mereka yang meyakini martabat segenap orang sebagai manusia dan oleh karena itu bertekad berpegang pada etika demokrasi, hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial, dan mereka yang mencari keamanan dalam kelompok hangat kecil dengan mencurigai atau bahkan memusuhi semua yang di luar. Sikap yang terakhir itulah yang disebut primordialisme. Garis pertentangan di dasawarsa mendatang akan antara humanisme universal dan primordialisme, antara penghayatan keagamaan yang positif dan terbuka dengan yang fundamentalistik, negatif dan tertutup, dan garis konflik itu akan ditemukan dalam masing-masing agama sendiri. Sekarang saja sebagian besar konflik-konflik di seantero bumi sudah tidak lagi bersifat ideologis, melainkan primordial.

Maka peran agama-agama dalam memajukan bangsa akan tergantung bagaimana mereka bersikap terhadap tantangan itu. Maukah mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh ideologi-ideologi lama dan menjadi pendukung paling utama cita-cita kemanusiaan universal ataukah mereka mau menjadi primordialistik? Memilih jalur primordialisme berarti berorientasi ke belakang, hanya mam-

pu bersikap negatif terhadap keseluruhan budaya global sekarang, berarti memilih menutup diri. Atau dapatkah mereka menjadi pendukung budaya politik yang demokratis, benteng toleransi dan pergaulan yang beradab, pejuang keadilan, pelindung fihak-fihak minoritas dan lemah, pembela hak-hak mereka yang tertindas, tanpa membedakan menurut golongan? Dapatkah mereka membuat kepentingan seluruh bangsa, bahkan seluruh umat manusia, dan juga kepentingan segenap orang, termasuk yang lain agamanya atau kepercayaannya, menjadi keprihatinan mereka, tanpa pamrih? Apakah agama-agama dalam hal ini betul-betul dapat bekerja sama? Dan itu bukan karena pertimbangan humanistik belaka, melainkan berdasarkan keyakinan keagamaan mereka?

II. BUDAYA MATERIALIS LIBERAL

Menurut hemat saya, sejauh agama-agama berhasil menjadi pendukung dan pendorong wawasan kemanusiaan universal itu, mereka juga akan mampu untuk mengatasi ancaman yang terletak dalam budaya globalisasi itu. "Budaya materialis liberal" ada dua unsur: "materialis" dan "liberal". "Materialis" berarti terutama: Dominasi luar biasa pertimbangan keuntungan ekonomis, yang lalu, lewat advertensi, iklan dlsb. seakan-akan merasuki semuanya, menyusup ke

dalam segala dimensi kehidupan, sehingga ke mana pun kita berarah, mesti sudah ada yang menjual barangnya.

Dalam alam ini transendensi tidak mempunyai tempat. Alam ini alam orang yang muda, cantik, tidak punya masalah, selalu sukses, sehat, berkomunikasi baik. Alam ini kosong Tuhan. Dan akhirnya kosong makna.

"Liberal" adalah lain. Tentang itu dalam filsafat sosial sudah ada debat yang hebat, kita ingat saja nama seperti Rawls, Charles Taylor, Michael Walzer atau Daniel Bell untuk menyebutkan saja beberapa nama. "Liberal" ada kaitannya dengan masyarakat pluralistik. Karena masyarakat terdiri dari sekian komunitas dengan nilai-nilai dan cita-cita sendiri, masyarakat sebagai keseluruhan, yang ditata lewat negara, tidak dapat memaksakan salah satu dari "proyek hidup bermakna" itu, melainkan menyediakan kerangka sehingga semua komunitas dalam masyarakat merasa terjamin dalam identitas kalau pun negara tidak 100% ditata menurut cita-cita mereka.

Tentu saja, "liberalisme" bisa juga, dan cenderung jadi, menjadi "libertarianisme", suatu sikap yang memangkas norma-norma moral dan mengizinkan segala apa dilakukan asal tidak dipaksakan dan tidak mengganggu kebebasan serupa orang lain. Suatu pemangkasan moralitas yang ciri-

ciri paling mencoloknya adalah apa yang disebut "revolusi dalam seksualitas".

Maka di situ kita harus memilah-milah. Tak mungkin masyarakat yang pluralis berkembang secara demokratis dan manusiawi kecuali semua komunitas dapat menemukan tempat di dalamnya, tempat yang memungkinkan mereka kerasa karena identitas mereka terjaga. Tetapi "liberalisme" itu tidak perlu menjadi "libertarianisme". Dalam masyarakat pluralis memang tidak mungkin satu golongan, termasuk mayoritas, begitu saja mengharapkan seluruh cita-cita maksimal mereka menjadi tatanan bagi seluruh masyarakat. Apalagi di dalam komunitas itu sendiri ada perbedaan pendapat cukup keras mengenai apa yang sebenarnya paling sesuai dengan cita-cita mereka itu. Maka semua harus bersedia dengan yang tidak 100 persen. Tetapi nilai-nilai bersama masih banyak. Adalah salah satu tugas di tahun-tahun mendatang menemukan pola hidup bersama yang memungkinkan bangsa sepluralis bangsa Indonesia hidup bersama dengan cara yang memungkinkan semua komunitas mengidentifikasi diri dengannya.

III. Hubungan antar komunitas

Konflik amat serius, sampai berdarah, yang pecah dalam bangsa Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini sudah cu-

kup untuk meyakinkan kita bahwa tugas menciptakan kehidupan sebagai bangsa di mana semua dapat mengidentifikasi diri dengannya, dapat merasa ikut memiliki bangsa ini, adalah salah satu prioritas paling tinggi. Dengan lain kata, sesudah hancurnya Orde Baru meninggalkan puing-puing persatuan bangsa, kita hampir harus mulai dari titik nol.

Kita harus belajar apa itu toleransi. Belajar menangani pluralisme dan hidup dengan baik di dalamnya. Kita harus belajar bersikap positif terhadap komunitas yang sudah lama saling mencurigai dan barangkali terlibat dalam konflik. Kita harus belajar saling menghormati dalam perbedaan.

Etika demokrasi dan hak-hak asasi manusia, keadilan sosial yang harusnya ditegakkan lewat pembangunan, solidaritas lintas kelompok dan golongan merupakan unsur-unsur etika kemanusiaan universal yang amat penting bagi kita.

Jelas juga bahwa justru agama-agama paling cocok untuk memajukannya, untuk mengembangkan sikap-sikap positif itu. Sayang, para agamawan juga hanya manusia. Yang normatif belum tentu menjadi nyata. Andaikata kita bisa berhenti saling menghojat dan saling menceriterakan hal-hal jelek, sudah akan menjadi kemajuan besar. Para panutan agama seharusnya selalu bicara baik tentang yang lain. Sa-

ling mengkafirkan harusnya ditolak, bahkan dianggap dosa karena akhirnya hanya Tuhanlah yang berhak menentukan siapa kafir dan siapa tidak.

Maka masa depan bangsa kita akan banyak tergantung dari agama-agama.■

